

Analisis yuridis terhadap upah proses dan implementasinya dari perspektif hukum perburuhan Indonesia analisis kasus terhadap putusan Mahkamah Agung no 300 k pdt sus phi 2014 jo putusan pengadilan hubungan industrial Jakarta Pusat no 53 phi g 2013 pn j = Juridical analysis on the process wages and its implementation from the perspective of Indonesian labor law case analysis on the supreme court decision no 300 k pdt sus phi 2014 jo the Central Jakarta industrial relations court decision no 53 phi g 20 / Fariz Pramaputra

Fariz Pramaputra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20412893&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk memahami pengaturan tentang upah selama proses pemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan istilah Upah Proses dan implementasinya dalam praktek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dibahas juga mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap frase “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga implementasi upah proses menjadi seragam di dalam praktek. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan meneliti bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi upah proses oleh Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung dalam putusannya telah berbeda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011, karena rasa keadilan para hakim; salah satu contoh adalah Putusan Mahkamah Agung No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.

ABSTRACT
This undergraduate thesis aims to understand the provision on wages during the termination of employment process or known by the term Process Wages and its implementation in practice according to the prevailing laws and regulations. In addition, there is also a discussion regarding the Constitutional Court Decision No. 37/PUU-IX/2011 that aims to give interpretation on the phrase “there is no decision” in Article 155 paragraph (2) of Law No. 13 Year 2003 on Manpower so that the implementation of process wages becomes uniform in practice. This undergraduate thesis used juridical-normative research method by examining literature materials as well as the prevailing laws and regulations. The author also conducted a series of interviews to be used as supporting data. The result of this research concluded that the implementation of the process wages by the Industrial Relations Court and the Supreme Court in its decision is different from the

prevailing laws and regulations, even after the enactment of the Constitutional Court Decision No. 37/PUU-IX/2011, due to the sense of justice of the judges; one example is the Supreme Court Decision No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. the Central Jakarta Industrial Relations Court No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.